

**NILAI RELASIONAL MODEL KALIMAT DALAM WACANA
KAMPANYE CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN PERIODE 2008 – 2013
(ANALISIS WACANA KRITIS)**

(Relational Value of Sentences Models in Campaign Discourse of Governor and Vice Governor Candidates of South Sulawesi in the Period of 2008—2013)

Armiati Rasyid

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
Jalan Diponegoro No.25 Manado 95112 Telepon (0431) 876103
Pos-el: balaibahasasulawesiutara@yahoo.co.id, armiati@yahoo.com
Diterima: 20 April 2009 ; Disetujui; 6 Juni 2009

Abstract

The objectives of the research are to describe, to interpret, and to explain the use of the relational value of sentences models in Campaign Discourse of Governor and Vice Governor Candidates of South Sulawesi in the Period of 2008—2013. The method used qualitative approach. It is a kind of critical discourse analysis of Fairclough Model that analyzes on three dimensions of discourse started from the text description to the interpretation and explanation. Result of the study shows that the three candidates have used the efficiency of the value in sentences models includes the use of declarative model, interrogative model, and imperative model. All of the sentences models are used to assert the candidate identity, to show program, and to engrave the ideology values such as religious value, local cultural value, and grammatical value. Those are the opponent which cover the partisan and non-partisan of the candidates, among the candidates, even toward the certain institution.

Key words: *critical discourse, sentences models, power, ideology*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan, menginterpretasikan, dan menjelaskan penggunaan nilai relasional model kalimat dalam wacana Kampanye Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008 – 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Ini merupakan analisis wacana kritis model Fairclough yang menganalisis tiga dimensi wacana dimulai dari deskripsi teks. Interpretasi hingga eksplanasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga calon menggunakan efisiensi nilai dalam model kalimat termasuk penggunaan model deskriptif model interogatif, dan model imperatif. Semua model kalimat digunakan untuk menginformasikan identitas calon untuk menunjukkan program, dan untuk memaparkan nilai-nilai ideologi seperti nilai agama, nilai budaya lokal, dan nilai gramatikal. Hal-hal tersebut yang mencakupi partisan dan nonpartisan calon di antara calon, bahkan terhadap lembaga tertentu.

Kata kunci; analisis wacana, model kalimat, kekuasaan, ideologi

1. Pendahuluan

Pada tanggal 5 November 2007 lalu, di Provinsi Sulawesi Selatan diselenggarakan pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008-2013. Dalam pemilihan tersebut, ada tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur (cagub/cawagub) yang bersaing, yaitu (1) pasangan H.M. Amin Syam dan Prof. Dr. H. Mansyur Ramli (Asmara), (2) pasangan Ir. H.A. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, M.Si. dan Ir. H. Mubyl Handaling, dan (3) pasangan H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. dan Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.S. (Sayang). Sebagai pemenang dalam pilkada tersebut versi KPUD Sulawesi Selatan dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung adalah pasangan nomor urut 3, pasangan Sayang.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh para kandidat tersebut agar dapat terpilih sebagai pemenang. Di antaranya adalah melakukan orasi politik melalui kampanye dalam rangka memperkenalkan visi dan misi yang akan diembannya.

Selama masa kampanye, para kandidat melakukan upaya untuk meyakinkan para pemilih bahwa merekalah yang terbaik, di antaranya adalah mendayagunakan media bahasa. Mereka memproduksi bahasa yang menciptakan citra bahwa mereka dapat membangun Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengindikasikan suatu ideologis tertentu seperti untuk mempertahankan kekuasaan, melakukan perubahan, atau memperbaiki sistem.

Dalam setiap orasi politik mereka, kata-kata dan kalimat yang dipilih dan disertai dengan intonasi tertentu bukanlah semata-mata ekspresi pribadi, melainkan sengaja dipakai untuk maksud-maksud tertentu, yaitu untuk memengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku masyarakat

agar berpikir tentang realitas sosial-politik yang ada, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar atau tidak sadar berada dalam wilayah kekuasaan para kandidat tersebut dan memutuskan untuk memilih salah satu kandidat tersebut.

Teks dalam wacana kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008—2013 (selanjutnya wacana kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2008—2013 disingkat WKC) tidak sekadar menampilkan simbol-simbol linguistik, tetapi di balik teks tersebut mengandung makna atau bahkan suatu hegemoni (ideologi dan kekuasaan) yang tidak dapat dipahami tanpa interpretasi yang mendalam. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bread (dalam Santoso 2003:1) bahwa penelitian tentang bahasa yang sering digunakan dalam dunia politik dapat membantu memahami persoalan (1) siapa yang ingin berkuasa, (2) siapa yang ingin menjalankan kekuasaan, dan (3) siapa yang ingin memelihara kekuasaan. Para cagub/cawagub merumuskan ideologi secara jelas dan kemudian disebarakan kepada khalayak. Dalam perumusan dan penyebaran ideologi tersebut, peranan bahasa sangat menentukan untuk membentuk suatu realitas sosial tertentu.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, kampanye politik cagub/cawagub Sulawesi Selatan Periode 2008-2013 juga merupakan salah satu fenomena kebahasaan yang menarik untuk dilihat dan dikaji secara kritis. Kajian ini senada dengan kajian Santoso (2002), tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Wacana Politik Pasca Orde Baru, karena menggunakan pisau bedah yang sama yaitu AWK Model Fairclough, namun berdasarkan data yang dikaji peneliti, hasil atau temuan yang didapatkan dari kajian ini akan berbeda dari kajian sebelumnya

karena dalam pandangan peneliti setiap calon pemimpin memiliki kekhasan dalam berorasi yang tergambar pada taraf linguistik dalam level kosakata dan gramatika sehingga dapat membedakannya antara satu pemimpin dan pemimpin yang lain. Selain itu, persoalan-persoalan sosial, politik, dan budaya yang dihadapi setiap daerah juga berbeda sehingga dapat menciptakan variasi bahasa yang berbeda pula.

Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengekplanasi penggunaan model kalimat dalam merekam, dan merefleksikan kekuasaan, kondisi politik, dan ideologi ketiga pasang kandidat. Bagaimana para calon kandidat tersebut selalu menciptakan bahasa untuk mendapatkan dukungan atas kekuasaan yang dimilikinya. Bagaimana para kandidat tersebut secara ideologis memakai kata-kata atau kalimat tertentu dan makna apa yang tersembunyi di balik setiap orasi politik mereka.

Sehubungan dengan itu, kajian ini termasuk dalam kajian kualitatif, yang menurut Bogdan dan Taylor 1975(dalam Moleong (2008:4)) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis kajian ini tergolong dalam analisis wacana kritis (AWK) Model Fairclough (1995). Dalam aplikasinya, AWK berupa analisis terhadap tiga dimensi wacana secara simultan mulai dari deskripsi teks dalam wacana kampanye cagub/cawagub Sulawesi Selatan, interpretasi praktis wacana, dan ekplanasi ideologi sosiokultural.

Data dalam kajian ini berupa data lisan dan tulisan yang di dalamnya terdapat model kalimat. Sumber data lisan kajian ini adalah rekaman orasi politik ketiga kandidat Gubernur Sulawesi

Selatan beserta tim kampanyenya pada pembacaan visi-misi dan pada masa kampanye. Sumber data tertulis adalah teks orasi yang dimuat di surat kabar harian Fajar dan Tribun Timur khususnya edisi bulan Oktober 2007, termasuk yang berbentuk slogan. Selain itu, juga diperoleh melalui baliho-baliho para kandidat yang terpajang di sejumlah tempat tertentu dan strategis di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan pengamatan langsung pada proses kampanye, perekaman orasi politik atau kampanye, dan analisis dokumen.

Instrumen utama kajian ini adalah peneliti sendiri dengan cara melakukan klasifikasi untuk menentukan teks yang memenuhi kriteria sebagai data penelitian. Instrumen penunjang, penelitian ini adalah pedoman observasi, dokumentasi, dan alat perekam untuk merekam proses kampanye

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data. Dalam kajian ini, data dianalisis dengan menggunakan model alir Miles dan Huberman (dalam Moleong 2008:278) yang terdiri atas tiga tahap, yakni (1) tahap reduksi data mencakup langkah-langkah analisis wacana kritis Fairglouch dalam pemerian aspek-aspek linguistik teks kampanye, penafsiran praktik wacana, dan penjelasan praktik sosiokultural, (2) tahap penyajian data. Data yang representatif disajikan dengan menggunakan urutan penomoran tertentu kemudian diikuti oleh deskripsi analisis data, dan (3) tahap penarikan simpulan dan verifikasi.

Agar kajian ini memiliki kredibilitas atau absah sebagai temuan sebuah penelitian, perlu dilakukan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan, yaitu (1) ketekunan pengamatan untuk menemukan kedalaman, (2) pemeriksaan

teman sejawat, dan (3) triangulasi sumber dan ahli melalui diskusi atau konsultasi, baik secara formal maupun informal dengan pakar yang berkompeten.

2. Kerangka Teori

2.1 Analisis Wacana Kritis (AWK)

Dalam AWK, wacana tidak semata dikaji dalam aspek linguistik, tetapi juga dihubungkan dengan konteks yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik kekuasaan. Wacana merupakan penggunaan bahasa yang dipahami sebagai praktis sosial (Fairclough, 1989:20; 1995:135) yang menggambarkan hubungan dialektis di antara peristiwa tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Menurut Fairclough penggunaan label kritis dalam kajian ini memunyai makna tersendiri dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan yang mungkin disembunyikan dari orang-orang –seperti hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang mengacu pada wacana yang dikaji. Analisis wacana kritis menganalisis hubungan sosial melalui cara yang difokuskan pada elemen-elemen linguistiknya yang dikemukakan untuk menunjukkan penentu yang biasanya terselubung dalam sistem hubungan sosial, serta efek-efek yang terselubung yang mungkin mereka miliki dalam sistem tersebut.

Ada lima karakteristik AWK yang disimpulkan Eriyanto (2003:7--14; bandingkan dengan Jorgensen dan Philip, 2007:115--120 dan Santoso, 2003:51--54) dari pendapat Teun van Dijk, Fairclough dan Wodak, sebagai berikut (1) wacana dipahami sebagai sebuah tindakan atau diasosiasikan sebagai bentuk interaksi, (2) AWK mempertimbangkan konteks wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi (3) wacana ditempatkan dalam konteks historis tertentu, (4) AWK juga

mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam analisisnya, dan (5) dalam wacana kritis, teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.

2.2 Analisis Wacana Kritis Model

Fairclough

Fairclough sebenarnya bukanlah akademisi ilmu komunikasi. Saat ini dia masih tercatat sebagai Guru Besar Linguistik di *Department of Linguistics and English Language, Lancaster University, Inggris*. Fairclough adalah salah seorang yang mengembangkan pendekatan AWK yang merupakan cabang dari linguistik dan analisis wacana (*discourse analysis*). Fairclough meminati masalah kajian kritis wacana dalam teks berita dimulai sejak tahun 1980-an. Dia melihat bagaimana penempatan dan fungsi bahasa dalam hubungan sosial khususnya dalam kekuatan dominan dan ideologi. (Vinsensius, 4 Desember 2007).

Fairclough membangun suatu model analisis wacana yang memunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya sehingga ia mengombinasikan tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Untuk melihat bagaimana pemakai bahasa membawa nilai ideologis tertentu, dibutuhkan analisis secara menyeluruh. Selanjutnya, Fairclough (1995:98) melihat wacana secara simultan sebagai (1) teks-teks bahasa, baik lisan maupun tulisan, (2) praktik kewacanaan yaitu produksi teks dan interpretasi teks, (3) praktik sosiokultural, yaitu perubahan-perubahan masyarakat, institusi, kebudayaan, dan sebagainya yang menentukan bentuk dan makna sebuah wacana. Ketiga unsur wacana itu disebut oleh Fairclough sebagai *dimensi wacana* yang harus dianalisis secara integral, yang dikombinasikan dengan tiga dimensi

metode analisis wacana.

Dimensi analisis wacana yang dimaksud adalah *deskripsi*, *intrepretasi*, dan *eksplanasi*. *Deskripsi* merupakan tingkatan yang berhubungan dengan teks. *Interpretasi* berkaitan dengan antara teks dengan interaksi yang melihat teks sebagai suatu produk suatu produksi dan sebagai sumber dalam proses interpretasi. *Eksplanasi* berkaitan dengan hubungan antara konteks interaksi dan sosial dengan penentuan sosial proses produksi dan interpretasi, dan efek-efek sosialnya.

2.2.1 Dimensi Teks

Dalam pandangan kritis, teks dibangun dari sejumlah piranti linguistik yang di dalamnya tersembunyi ideologi dan kekuasaan. Menurut Fairclough (dalam Santoso:2003:55), tahap pemerian ini berupa analisis terhadap kosakata, gramatika, dan struktur teks. Dalam kajiannya itu, Fairclough senantiasa menghubungkan ketiga aspek deskripsi teks dengan tiga jenis nilai dalam aspek formal teks yaitu *eksperiensial*, *relasional*, dan *ekspresif*. Akan tetapi, dalam kajian ini hanya akan difokuskan pada aspek relasional gramatika.

Nilai relasional gramatika berhubungan dengan bagaimana cara gramatika mengodekan isyarat relasi hubungan sosial timbal balik yang diperankan penghasil teks? Terdapat tiga aspek yang dikaji oleh Fairclough berkaitan dengan nilai ini yaitu (1) model-model kalimat, (2) modalitas, dan (3) pronomina (persona). Dalam hal ini, kajian ini hanya berfokus pada nilai relasional model kalimat.

Model kalimat berkaitan dengan cara bagaimana kalimat itu diekspresikan, apakah dalam bentuk deklaratif, interogatif, atau imperatif. Ketiga model ini menempatkan subjek yang berbeda. Dalam bentuk kalimat deklaratif, posisi

subjek penutur sebagai pembicara atau penulis adalah pemberi informasi dan posisi petutur sebagai penerima informasi. Dalam kalimat interogatif, posisi pembicara atau penulis menanyakan sesuatu kepada lawan bicara atau petutur, sebaliknya lawan bicara sebagai penyedia informasi. Pada kalimat imperatif, pembicara atau penulis berada pada posisi meminta lawan bicara (untuk selanjutnya melakukan aksi), sebaliknya lawan bicara atau petutur idealnya sebagai pelaku yang tunduk.

2.2.2 Dimensi Praktik Wacana

Aspek formal teks dihubungkan oleh Fairclough dengan aspek praktik sosial yang bisa dibatasi oleh isi, hubungan, dan subjek dan dia menghubungkannya dengan efek-efek struktural (pengetahuan, keyakinan, hubungan sosial, dan identitas sosial) melalui metode interpretasi.

Metode interpretasi digunakan untuk mengungkap hubungan antara produksi dan interpretasi proses-proses diskursif. Pertanyaan pokok dalam analisis ini adalah bagaimana penghasil dan penafsir teks bahasa menggunakan sumber yang tersedia secara sosial yang membangun urutan wacana Fairclough (dalam Santoso, 2003:63). Interpretasi digeneralisasikan melalui kombinasi apa yang ada dalam teks dan apa yang ada pada benak penafsir. Dari sudut pandang penafsir teks, aspek-aspek formal teks menjadi isyarat yang mengaktifkan elemen-elemen sumber atau bahan-bahan partisipan (*member resource*) penafsir dan penafsiran digeneralisasikan melalui pengaruh dialektik isyarat dan bahan-bahan partisipan. Dua hal yang diinterpretasi adalah teks dan konteks (Fairclough, 1989:142).

Dalam menginterpretasi teks, ada empat level ranah yang diinterpretasi,

yakni: bentuk lahir ujaran, pemaknaan ujaran (penggunaan semantik dan pragmatik), koherensi lokal (membentuk hubungan makna antarkalimat ujar, menghasilkan (jika mungkin) interpretasi koheren dari pasangan-pasangan atau kelompok kalimat ujar, dan struktur teks dan poin yang menggambarkan bagaimana keseluruhan teks saling mendukung, yang menjadi suatu koherensi global.

Adapun yang menjadi fokus kajian Fairclough dalam interpretasi konteks adalah (1) hubungan konteks situasi dengan tipe wacana, (2) hubungan konteks antarteks dengan presuposisi, dan (3) tindak ujaran. Untuk menginterpretasi hubungan konteks dengan tipe wacana, Fairclough (2003:165) mengajukan empat pertanyaan penting yang berkaitan dengan bagian utama situasi yaitu apa yang terjadi?; siapa yang terlibat?; dalam hubungan apa?; dan apa peran bahasa? Untuk menginterpretasi hubungan konteks antarteks dengan praanggapan (presuposisi), Fairclough (1989:171) memandang "wacana dan teks-teks yang di dalamnya memiliki beberapa sejarah". Interpretasi konteks antartekstual berkenaan dengan persoalan menentukan seperangkat kepemilikan teks, yakni apa yang dapat diambil sebagai dasar bersama untuk partisipan atau apa yang dipraanggapkan. Seperti pada konteks situasional, para partisipan wacana sampai pada interpretasi yang sama atau berbeda, dan interpretasi partisipan yang lebih berkuasa yang menentukan presuposisi.

Untuk memahami makna tindak ujaran, menurut Fairclough (1989:156), ujaran tidak dapat ditentukan secara sederhana berdasarkan aspek formal kalimat ujar, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks tekstual kalimat ujar, konteks situasi, dan konteks antartekstual, serta "elemen-elemen sumber atau bahan partisipan".

Kaidah tindak ujaran yang menentukan tipe wacana mewujudkan gambaran ideologis subjek dan hubungan sosial mereka. Misalnya, hak-hak asimetris dan kewajiban antarsubjek dalam mengajukan pertanyaan, meminta tindakan, mengeluh, dan kewajiban menjawab, bertindak, serta menjelaskan tindakan seseorang.

2.2.3 Dimensi Praktik Sosiokultural

Dimensi praktik sosiokultural menjelaskan bagaimana praktik sosiokultural menentukan teks. Hubungan antara teks dan struktur sosial dimediasikan oleh konteks sosial wacana. Hubungan wacana dan proses-proses sosial (pertaruhan dan hubungan kekuasaan) berkaitan dengan proses analisis ketiga Fairclough, yaitu tahap eksplanasi.

Tahap eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan wacana sebagai proses sosial, menunjukkan bagaimana wacana ditentukan oleh struktur sosial dan apa efek reproduksi wacana yang dimiliki secara kumulatif pada struktur tersebut, mempertahankan atau mengubah. Penentuan efek-efek sosial ini ditengahi oleh sumber atau bahan partisipan bahwa struktur sosial membentuk wacana dan wacana mempertahankan atau mengubah sumber atau bahan partisipan (Fairclough, 2003:182). Dengan kata lain, pilihan bahasa yang digunakan dalam wacana tidak bebas, tetapi dibuat berdasarkan situasi politik, sosial, kultural, dan ideologi.

Dalam pandangan Fairclough (2003:180), struktur sosial menjadi fokus hubungan kekuasaan, dan proses serta praktis sosial yang difokuskan meliputi proses dan praktik usaha sosial. Eksplanasi merupakan persoalan melihat wacana sebagai proses-proses perebutan sosial dalam matriks hubungan kekuasaan.

Eksplanasi mempunyai dua dimensi, yakni (1) proses-proses perebutan dan (2) struktur hubungan kekuasaan. Dimensi pertama menekankan pada pengaruh sosial wacana sebagai bagian dari perebutan sosial, perebutan nonkewacanaan, menekankan pada masa depan. Dimensi kedua ini menekankan pada penentuan sosial wacana di masa lalu. Baik pengaruh/efek sosial wacana maupun determinan sosial wacana keduanya diteliti pada tiga level organisasi sosial, yakni masyarakat, institusi, dan situasi.

Tahapan eksplanasi ini melibatkan perspektif khusus tentang sumber atau bahan partisipan, tempat mereka dilihat secara khusus sebagai ideologi. Karena itulah, asumsi-asumsi tentang budaya, hubungan sosial, dan identitas sosial tergabung dalam sumber atau bahan partisipan dilihat sebagai penentu hubungan kekuasaan khusus pada masyarakat atau institusi dan perihal kontribusi mereka pada usaha mempertahankan atau mengubah kekuasaan itu dianggap sebagai ideologi.

3. Pembahasan

Nilai relasional dalam pilihan gramatika berupa penggunaan model kalimat. Model kalimat yang ditemukan adalah kalimat deklaratif, imperatif, dan interogatif.

Sehubungan dengan ketiga model kalimat tersebut, terdapat sekumpulan tindak tutur yang berbeda secara gramatika, dan sekumpulan posisi subjek yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam menganalisis ketiga model kalimat tersebut, juga digunakan lima jenis tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle (dalam Leech, 1993:164--165).

3.1 Penggunaan Model Kalimat

Deklaratif dalam WKC

Berdasarkan data yang terkumpul, penulis melihat bahwa pada dasarnya para pasangan kandidat cenderung mendayagunakan model kalimat deklaratif dalam berorasi. Kalimat deklaratif dalam WKC memiliki tujuan tertentu dapat dilihat pada pembahasan berikut.

Pada kutipan berikut, Amin Syam (AS) menjabarkan keberhasilan pemerintahannya di bidang ekonomi dengan mendayagunakan kalimat deklaratif.

- (1) AS: "Selama 5 tahun saya memimpin Sulawesi Selatan, pendapatan masyarakat meningkat. Boleh cek, boleh tanya kepada orang-orang bank. Pada tahun 2005, 18 trilyun. *Siaga ro egana seddi trilyun? Siaga? ia niasenge seddi trilyun, egana 12 nolo'na.* Tahun 2006 tabungan masyarakat 19 trilyun. Pendapatan masyarakat naik 1 trilyun, Saudara-saudara sekalian. APBD Sulsel juga naik. Tahun 2003, APBD hanya 800 M, sekarang APBD Sulsel 1,90 Trilyun." (3.1a)

Kutipan (1) merupakan bagian dari pidato AS di Lapangan Eks Pasar Tua Bulukumba, Sabtu 27 Oktober 2007. Topik yang diangkat keberhasilan pemerintahan Amin Syam dalam bidang ekonomi. Model kalimat deklaratif yang ideologis dalam kutipan tersebut dapat dilihat pada "*Selama 5 tahun saya memimpin Sulawesi Selatan, pendapatan masyarakat meningkat ... Pada tahun 2005, 18 trilyun ... Tahun 2006 tabungan masyarakat 19 trilyun. Pendapatan masyarakat naik 1 trilyun, Saudara-saudara sekalian. APBD Sulsel juga naik. Tahun 2003, APBD hanya 800 M, sekarang APBD Sulsel 1,90 Trilyun*". Dalam kalimat tersebut, penutur berperan sebagai pemberi informasi dan petutur

sebagai penerima informasi. Dalam hal ini, kalimat deklaratif ini menjalankan fungsi tindak tutur representatif. Dari segi perlokusi tindakan ini, penutur menginginkan masyarakat percaya bahwa dia telah berhasil dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, penutur memarjinalkan lawan politiknya dengan membantah pernyataan bahwa pembangunan di bidang ekonomi tidak berhasil selama pemerintahannya dan berusaha memengaruhi para pendengarnya bahwa dia bersama pasangannya layak untuk dipilih karena telah terbukti berhasil meningkatkan perekonomian rakyat.

Demikian halnya dengan calon wakil gubernur pasangan nomor 3, Agus Arifin Nu'mang (AAN), mendayagunakan kalimat deklaratif, seperti pada kutipan berikut.

- (2) AAN: “Pemerintahan Sulsel sudah harus berubah. Caranya dengan memilih pemimpin yang memiliki kemampuan wawasan, relasi, cerdas, enerjik, dan muda.” (3.1b)

Kutipan (2) tersebut merupakan bagian dari orasi AAN pada hari Minggu, 28 Oktober 2007 di Lapangan Merdeka, Sengkang, (Harian Fajar, Edisi Senin, 29 Oktober 2007). Topik yang diangkat adalah perubahan kepemimpinan. Dalam kutipan ini terdapat dua kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif pertama menjalankan fungsi tindak tutur ekspresif, yaitu penutur mengkritik pemerintahan yang ada meskipun tidak dikemukakan secara jelas mengapa pemerintahan harus diubah. Akan tetapi, jika kalimat selanjutnya dicermati dapat dipahami bahwa penutur menganggap kepemimpinan yang ada kurang wawasan, kurang relasi, kurang cerdas, kurang enerjik karena tidak muda lagi. Dari segi perlokusi, tuturan ini diungkapkan agar para petuturnya

melakukan perubahan kepemimpinan dalam pemerintahan Sulsel. Pada kalimat deklaratif kedua, terkandung fungsi tindak tutur representatif yaitu penutur menjelaskan cara melakukan perubahan yang dimaksud pada kalimat pertama. Dengan demikian, penutur mendayagunakan kalimat deklaratif pertama untuk melakukan kekerasan simbolik yaitu mendominasi masyarakat agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya, dan kalimat deklaratif didayagunakan untuk menonjolkan identitas pasangan Sayang untuk memarjinalkan kandidat yang lain.

3.2 Penggunaan Model Kalimat Imperatif dalam WKC

Kalimat imperatif atau kalimat perintah dalam bahasa Indonesia diperinci menjadi enam golongan makna (Alwi dkk., 2003), yaitu (1) perintah atau suruhan biasa, jika pembicara menyuruh lawan bicaranya berbuat sesuatu; (2) perintah halus, jika pembicara tampaknya tidak memerintah, tetapi menyuruh mencoba atau mempersilakan lawan bicara sudi berbuat sesuatu; (3) permohonan, jika pembicara meminta lawan bicara melakukan sesuatu demi kepentingan pembicara; (4) ajakan atau harapan, jika pembicara mengajak atau mengharapkan lawan bicara melakukan sesuatu; (5) larangan atau perintah negatif, jika pembicara menyuruh agar jangan dilakukan sesuatu; dan (6) pembiaran, jika pembicara meminta agar jangan dilarang.

Kalimat imperatif dalam WKC memiliki makna sebagai perintah biasa, ajakan, dan larangan. Berikut ini pembahasannya satu per satu. Kalimat imperatif pada kutipan berikut merupakan bentuk kalimat perintah biasa.

- (3) TS: “Serahkan urusan pemerintahan kepada ahlinya.”

Kutipan (3) ini merupakan salah

satu bunyi dari baliho TS (Tim Sayang). Kalimat imperatif dalam kutipan ini juga bermakna perintah biasa yang juga tergolong dalam kategori tindak tutur direktif. Jika dicermati lebih lanjut latar baliho tersebut, ahli pemerintahan yang dimaksud adalah pasangan nomor tiga. Berdasarkan analisis tersebut, perlokusi kutipan ini adalah masyarakat memilih pasangan nomor tiga karena mereka adalah pemimpin yang ahli. Dengan menjadikan gambar pasangan Sayang sebagai acuan dari frasa ahli pemerintahan, mengindikasikan adanya pamarjinalan terhadap kandidat lainnya karena pada dasarnya ketiga kandidat mengaku berpengalaman dan ahli dalam bidang pemerintahan.

Lain halnya dengan kedua kutipan berikut yang menyatakan makna ajakan.

- (4) AQM: “Kita semua tidak perlu lagi takut dengan intimidasi pihak-pihak tertentu. Sudah bukan zamannya lagi, hak-hak politik ditekan-tekan. Marilah kita konsisten pada pilihan kita untuk mendukung terciptanya pemerintahan Sulsel yang lebih baik.”

Kutipan (4) ini merupakan bagian dari orasi AQM (Azis Qahar Muzakkar) di Belopa, Rabu, 31 Oktober 2007 (Harian Fajar Edisi Kamis, 1 November 2007). Topik yang diangkat adalah kebebasan berpolitik. Dalam kutipan ini, terdapat dua kalimat imperatif yang pertama bermakna ‘larangan’ dan kedua bermakna ‘ajakan’. Kedua kalimat imperatif ini tergolong tindak tutur direktif, yaitu penutur orang melarang dan mengajak, dan para petuturnya sebagai orang yang dilarang dan diajak. Pernyataan AQM tersebut dilontarkan berdasarkan pengaduan simpatisannya bahwa ada oknum tertentu yang berusaha menakuti-nakuti warga agar tidak memilih pasangan nomor dua. Sudah

bukan rahasia lagi dalam setiap pilkada ataupun pemilu secara umum selalu terjadi kekerasan dan penindasan hak-hak politik rakyat banyak. Dalam kalimat imperatif ‘ajakan’, frasa “pemerintahan Sulsel yang lebih baik” yang dimaksud adalah suasana pemerintahan yang akan diciptakan oleh AQM jika terpilih menjadi gubernur. Dengan demikian, penutur menginginkan para petuturnya teguh pendirian untuk tetap mendukung pasangan nomor yang akan membangun sistem pemerintahan Sulsel yang lebih baik. Berdasarkan tinjauan makna tersebut dapat dipahami bahwa dalam kedua kalimat imperatif tersebut terdapat pamarjinalan terhadap kandidat atau timnya yang berusaha menghasut dan menakuti-nakuti para pendukung pasangan nomor dua. Selain itu, penutur juga menanamkan nilai-nilai *istiqamah* atau bersikap teguh pendirian kepada masyarakat.

Selanjutnya, kutipan berikut menyatakan kalimat imperatif yang bermakna ‘larangan’.

- (5) TS: “Jangan Tunda Kesehatan Gratis”

Kutipan (5) tersebut merupakan salah satu bunyi dari baliho pasangan Sayang. Topik yang diangkat adalah program kesehatan gratis. Kalimat imperatif ini termasuk jenis tindak tutur direktif, yaitu penutur melarang penutur untuk menunda kesehatan gratis. Perlokusi yang terdapat dalam kutipan ini adalah petutur tidak menunda program kesehatan gratis. Dalam hal ini, penutur telah melakukan kekerasan simbolik yaitu dengan mendominasi masyarakat dengan perintah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penutur yaitu memilih pasangan Sayang agar program kesehatan gratis dapat diwujudkan.

3.3 Penggunaan Model Kalimat Interogatif dalam WKC

Dalam bahasa Indonesia, kalimat interogatif secara umum ditandai dengan kehadiran kata tanya seperti apa, siapa, berapa, kapan, dan bagaimana serta dengan atau tanpa partikel *-kah* sebagai penegas. Pada bahasa tulis, jenis kalimat ini diakhiri dengan tanda tanya (?) dan pada bahasa lisan dengan suara naik, terutama jika tidak ada kata tanya atau suara turun.

Berdasarkan data yang terkumpul, dapat diketahui bahwa bentuk interogatif yang terdapat dalam WKC adalah kalimat interogatif yang ditandai dengan penggunaan partikel *-kah* setelah kata *apa* dan *ada*, *siapa*, dan *berapa*. Berikut ini analisis data tersebut yang dimulai dari penggunaan partikel *-kah* setelah kata *apa* dan *ada*.

- (6) AS: “Apakah perlu dilanjutkan pembangunan yang berhasil itu? Dilanjutkan! (Jawab massa) Perlu dilanjutkan? Betul? Betul! (Jawab massa). ... Baik, kalau pembangunan berhasil perlu dilanjutkan, maka pemimpinnya, gubernurnya apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Perlu! (Jawab massa).”

Kutipan (6) tersebut merupakan bagian dari orasi AS di Bulukumba pada tanggal 27 Oktober 2007. Topik yang diangkat adalah kesinambungan pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin atau gubernur yang lama. Pada kalimat interogatif tersebut, penutur bukan meminta informasi dan petutur bukan sebagai penyedia informasi. Akan tetapi, penutur sebagai penyedia informasi dan petutur sebagai penerima informasi. Dalam konteks tindak tutur, kutipan ini bermakna direktif. Penutur hanya meminta petuturnya untuk membantu meyakinkan dirinya bahwa pembangunan yang telah

dilakukannya memang perlu dilakukan dan meminta persetujuan petutur agar pemimpin atau gubernur lama melanjutkan kepemimpinannya. Di balik kedua tujuan tersebut, AS sebagai penutur memunyai tujuan tertentu yaitu dia ingin mendapatkan dukungan agar terpilih kembali menjadi gubernur. Dengan demikian, AS mendayagunakan kalimat interogatif ini untuk memarjinalkan kandidat lainnya.

Selanjutnya, pada kutipan berikut, AQM mendayagunakan partikel *-kah* setelah kata *ada*.

- (7) AQM: “Adakah calon lain yang secara langsung mengatakan bahwa saya anti korupsi dan kolusi? Tidak! (jawab massa pendukung). Hanya nomor berapa? Nomor 2! (teriak massa pendukung dan diikuti Aziz Qahhar Muzakkar).”

Kutipan (7) tersebut merupakan bagian dari orasi AQM di Lapangan Emmi Saelan Hertasning, Makassar, tanggal 28 Oktober 2007. Topik yang diangkat adalah AQM adalah kandidat anti korupsi dan kolusi. Meskipun tergolong dalam kalimat interogatif yang bersifat direktif, kalimat dalam kutipan tersebut merupakan kalimat deklaratif yang jika diparafrasekan berbunyi “tidak ada calon lain yang mengatakan secara langsung bahwa dirinya adalah anti korupsi dan kolusi”. Penutur memosisikan dirinya selain sebagai subjek yang meminta pembenaran, juga sebagai penyedia informasi. Berdasarkan pertanyaan dan jawaban yang terdapat dalam kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa penutur memarjinalkan kandidat lainnya dengan menonjolkan identitasnya.

Kemudian, dalam kutipan berikut, Tim kampanye Aziz-Mubyl mendayagunakan kata tanya *siapa* untuk menonjolkan identitas pasangan ini.

- (8) DJA: "Siapa kandidat yang paling miskin? Aziz Qahar! Siapa kandidat yang paling peduli kepada rakyat kecil? Aziz! Siapa kandidat yang paling sering masuk mesjid? Aziz! Siapa kandidat yang selalu berkhotbah di mesjid? Aziz!"

Kutipan (8) merupakan bagian dari orasi Dea Juri Amri (DJA) di Lapangan Emmi Saetan, Hertasning, Makassar, tanggal 28 Oktober 2007. Topik yang diangkat adalah profil AQM. Dalam kutipan tersebut, terdapat empat kalimat interogatif yang tidak sekadar sebagai kalimat tanya tetapi lebih memosisikan penutur sebagai penyedia informasi dan petutur sebagai penerima informasi. Penutur menonjolkan identitas AQM sebagai kandidat yang paling miskin, yang paling peduli kepada rakyat kecil, yang paling sering masuk masjid, dan yang selalu berkhotbah di masjid. Dua pertanyaan pertama menyangkut kehidupan sosial AQM dan dua pertanyaan lainnya menyangkut kehidupan religiusnya. Berdasarkan realita, di antara cagub dan cawagub, AQM dikenal sebagai profil calon gubernur yang sederhana, bersahaja, dekat dengan rakyat kecil, dan sebagai salah seorang pimpinan sebuah pesantren di Sulawesi Selatan tentu saja nilai religius tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Dengan mendayagunakan kedua sisi kehidupan AQM tersebut, penutur berusaha menanamkan ideologi sosialisme, humanisme, dan fundamentalisme Islam dalam pikiran masyarakat. Penutur sengaja menonjolkan identitas AQM tersebut untuk memengaruhi pikiran masyarakat Sulawesi Selatan yang masih sangat kuat menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dan mempertahankan budaya humanisme. Dengan demikian, penutur telah memarjinalkan kandidat lainnya dengan kalimat interogatif ini.

Terakhir, pada kutipan berikut MH mendayagunakan kata *berapa* menguji kesetiaan pendukung pasangan Aziz-Mubyl.

- (9) MH: "1 + 1 = berapa? Dua! Jawab massa 4 + 2 = berapa? Dua! Jawab massa 90 juta - 50 juta = berapa? Dua! Jawab massa. Itu berarti kalian sudah bertekad bulat memilih 2. Sembako + sarung = berapa? Dua! Jawab massa."

Kutipan (9) tersebut merupakan bagian dari orasi MH pada hari Selasa, 30 Oktober 2007 di Lapangan Belajen, Duri, Enrekang (Tribun Timur, Edisi Edisi Rabu, 31 Oktober 2007). Pernyataan ini sering juga dilontarkan oleh Tim Pejuang lainnya dengan hitungan yang berbeda. Topik yang diangkat adalah kekukuhan hati pendukung Aziz-Mubyl. Sepintas lalu, isi kalimat interogatif ini hanya sekadar hitungan biasa. Akan tetapi, setiap pertanyaan dalam kutipan tersebut mengandung makna kesetiaan dan kekukuhan hati para pendukung pasangan nomor dua ini untuk tetap memihak pada pasangan ini, meskipun disogok dalam bentuk uang atau barang. Dengan kalimat interogatif ini, penutur ingin memarjinalkan masyarakat yang masih bersifat materialistis dan kandidat yang selalu menghalalkan segala cara untuk memenangkan pilkada dengan melakukan penyogokan.

4. Simpulan

Kajian wacana kritis ini berfokus pada tujuan pendayagunaan model kalimat dalam WKC yang menyangkut efek pendayagunaan bentuk-bentuk kekuasaan dan bentuk ideologi yang dinaturalisasikan. Efek kekuasaan diwujudkan dalam bentuk pendominasi dengan memaksakan kehendak kepada petutur, baik secara halus maupun secara nyata dan

pemarjinalan dengan menjelek-jelekan, meremehkan, dan membatasi hak kandidat lain, bahkan mengkritik pemerintah terdahulu. Sementara itu, ideologi yang ditanamkan berupa nilai religius, nilai budaya lokal, nilai keetnik, sikap optimisme, rasa nasionalisme, dan identitas/status sosial.

Sehubungan dengan itu, secara umum dapat digambarkan bahwa pada dasarnya ketiga kandidat mendayagunakan model kalimat secara variatif untuk menampakkan kekuasaannya dan menanamkan ideologi tertentu. Meskipun demikian, bahasa yang digunakan oleh pasangan kandidat nomor tiga (Pasangan Sayang) lebih mampu memengaruhi dan meyakinkan pikiran masyarakat Sulawesi Selatan sehingga pasangan ini mampu mengalahkan kedua pasang kandidat lainnya. Hal ini disebabkan oleh kejelian kemampuan pasangan Sayang untuk membahasakan kondisi sosial-politik yang sedang terjadi dalam sebuah konsep yang mudah diterima oleh masyarakat. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah tentang hak dasar manusia khususnya tentang pendidikan dan kesehatan gratis. Kata “gratis” pada konsep ini mampu menghipnotis masyarakat Sulawesi Selatan, meskipun pada dasarnya mereka kurang memahami mekanisme konsep pendidikan dan kesehatan gratis tersebut.

Berdasarkan temuan dan simpulan yang dipaparkan di atas, penulis sebuah catatan kecil buat para kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan selanjutnya, hendaknya menggunakan bahasa yang mendidik masyarakat, informatif dan lugas, serta janji yang diucapkan harus realistis sehingga tidak terjadi kampanye negatif. Bahkan, harus tetap menjunjung tinggi aspek-aspek religius dan nilai budaya lokal yang masih dianut oleh masyarakat Sulawesi Selatan,

agar kemenangan yang diraih atau kekalahan yang dialami tidak menistakan martabat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan., dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eriyanto.2003. *Analisis Wacana: Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group UK Limited.
- , 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited.
- , 2003. *Language and Power*. Dialihbahasakan oleh Indah Rohmani, dkk. dengan judul *Language and Power; Relasi Bahasa, Kekuasaan dan Ideologi*. Malang: Boyan Publishing.
- Jorgensen, Marianne W. dan Louise J.Philips. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Terjemahan oleh Imam Suyitno, dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leech, Geoffrey. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Diterjemahkan oleh M.D.D. Oka dari buku aslinya *The Principles of Pragmatics*. Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Redaksi Fajar. Senin, 29 Oktober 2007. “Syahrul Tusuk Saja Kumisnya”. *Fajar*: hlm. 13.
- Redaksi Fajar. Kamis, 1 November 2007. “Aziz Qahhar Happy Ending di Belopa”. *Fajar*: hlm. 13.

Redaksi Tribun Timur. Rabu, 31 Oktober 2007. "Mubyl: Sarung + Sembako=2". *Tribun Timur*:hlm. 7.

Santoso, Anang.2002. "Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Wacana Politik". Disertasi. Malang: Universitas Negeri Malang.

----- 2003. *Bahasa Politik Pascaorde Baru*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Vinsensius, 4 Desember 2007. "Norman Fairclough". *Majalah Kajian Media*. Online. (<http://dictum4magz.wordpress.com/2007/12/04/norman-fairclough/>). Diakses tanggal 27 Februari 2008.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.